

# PEREMPUAN dan RUANG PUBLIK KOTA SEMARANG<sup>\*1</sup>

Donny Danardono<sup>\*\*1</sup>

Sejauh yang saya ketahui penyediaan layanan publik yang mengafirmasi gender perempuan di Kota Semarang hanya di bis Trans Semarang. Bagian belakang bis ini dikhususkan untuk perempuan. Beberapa kali di bis ini saya menyaksikan suami-istri atau sepasang kekasih harus berpisah tempat duduk. Saya—sebagai pria yang sering bepergian sendiri—merasa nyaman di bis ini. Saya tak pernah bepergian dengan bis Trans Semarang yang sesak dengan penumpang. Mungkin karena saya hanya menumpang bis itu pada hari Sabtu atau Minggu jam 14:00: yang tentu bukan merupakan waktu bergegas (*rush hour*).

Namun agaknya bis ini belum merupakan kendaraan umum yang nyaman untuk para ‘difabel sensorik netra’ (DSN; tuna netra). Pada Maret 2021 lalu Sammi Institut—sebuah lembaga di Demak yang memberdayakan kelompok rentan—melaporkan terjadinya 10 kasus pelecehan seksual terhadap DSN (wanita?) di halte dan bis Trans Semarang. Tampaknya para DSN (wanita?) tersebut mengalami pelecehan seksual saat memasuki atau berdiri di bis Trans Semarang, karena bis ini memisahkan tempat duduk pria dari tempat duduk wanita. Selain itu Sammi Institut juga melaporkan penghipnotisan seorang DSN di halte bis Trans Semarang untuk kemudian dirampok.<sup>1</sup>

Tampaknya pemerintah Kota Semarang cenderung menganggap berbagai ruang dan fasilitas publik di Kota Semarang telah relatif aman untuk perempuan. Mungkin hal ini terjadi, karena Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)—yang merupakan patokan pengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan yang berpengaruh pada keterwakilan kepentingan perempuan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan tentunya juga pada pembangunan—cukup tinggi sejak tahun 2014-2020, yaitu berkisar pada angka 75%. IDG Kota Semarang ini lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah yang berkisar di angka 74%.<sup>2</sup> Bisa jadi, dengan demikian, telah ada kesetaraan dan keadilan gender di banyak fasilitas publik Kota Semarang.

---

<sup>\*1</sup> Disampaikan di diskusi online “Layanan Kota Semarang Ramah Gender dan Aksesibilitas”, warung HAM, pada Senin 19 April 2021; link: <http://bit.ly/Whramahgender>

<sup>\*\*1</sup> Donny Danardono adalah pengajar Hukum dan Gender di Prodi Ilmu Hukum, FHK dan Filsafat Ruang Perkotaan di PMLP, Universitas Katolik Soegijapranata.

<sup>1</sup> “Anindha Gauri: Tuna Netra Rawan Jadi Korban Pelecehan Seksual di BRT Trans Semarang”, 2021, Tribun Jateng 22 Maret; <https://jateng.tribunnews.com/2021/03/22/anindha-gauri-tuna-netra-rawan-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-brt-trans-semarang>

<sup>2</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020, *Laporan Akhir Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2020*, Semarang, hal. 21.

Namun hal itu tak boleh membuat kita abai, bahwa di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang masih terjadi berbagai bentuk kekerasan terhadap wanita. Menurut Laporan Tahunan LRC-KJHAM jumlah kekerasan terhadap wanita di Jawa Tengah dan Kota Semarang pada tahun 2020 cenderung menurun bila dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, di Jawa Tengah, terjadi 1517 kekerasan terhadap wanita. Kasus terbesar adalah KDRT (797 kasus), perkosaan (384 kasus), dan pelecehan seksual (129 kasus). Berdasarkan itu LRC-KJHAM menyatakan kekerasan terhadap wanita di ranah privat lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi di ranah publik: “Ranah ini tertinggi angkanya dibanding ranah yang lain. Sementara kekerasan paling sedikit terjadi **di ranah negara (ruang publik??, DD)**, yaitu 0% atau 3 kasus dari 1517 kasus”.<sup>3</sup> Namun di laporan itu tak jelas perbandingan jumlah kekerasan terhadap wanita yang terjadi di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan kota-kota lain di Jawa Tengah.

Pada Januari 2021, LRC-KHAM melaporkan, bahwa selama tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah terjadi 151 kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut LRC-KJHAM urutan jumlah terbesar kasus-kasus kekerasan terhadap wanita itu adalah: “... di Kabupaten Semarang, kedua Kota Semarang, ketiga Kabupaten Banyumas, Keempat Kabupaten Demak dan kelima Kabupaten Pekalongan”. Dan jumlah KDRT tetap lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai bentuk lain kekerasan terhadap wanita: “... dilihat dari sisi pekerjaan, kasus kekerasan dialami oleh perempuan dari berbagai bentuk pekerjaan, seperti perempuan pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, pekerja pabrik. Tetapi paling banyak menimpa korban yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga”.<sup>4</sup> Namun demikian patut dicatat, bahwa terjadi penurunan tajam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 (1517 kasus) ke tahun 2020 (151 kasus).

Dari data “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” dan LRC-KJHAM tersebut mungkin benar kebanyakan ruang publik (ranah negara) di Kota Semarang dan di berbagai tempat di Provinsi Jawa Tengah relatif aman untuk perempuan. Mungkin Pengarus Utamaan Gender (PUG) di berbagai ruang publik di Kota Semarang cukup berhasil, tapi tidak demikian di ruang privat dan ruang-ruang publik swasta (perusahaan, pabrik).

### **Catatan: Kemajemukan Identitas Perempuan dan Kekerasan terhadap Sesama Perempuan**

Diskriminasi gender terhadap perempuan memang selalu menghasilkan berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan (sunat perempuan, pengkaitan kesucian dengan selaput dara, pelecehan seksual, dan perkosaan). Semua itu terjadi

---

<sup>3</sup> Forum Pengada Laporan (FPL) LRC-KJHAM, 2018, *Laporan Situasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*, Semarang, hal. 11-12.

<sup>4</sup> “Catatan KJHAM Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng Meningkat, Ini Datanya”, 2021, [www.sigijateng.com](http://www.sigijateng.com), 8 Maret 2021; <https://sigijateng.id/2021/catatan-kjham-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jateng-meningkat-ini-datanya/>

dalam lingkup ideologi patriarki. Tapi apakah gender merupakan satu-satunya patokan untuk mengukur kemandirian dan ada tidaknya kekerasan terhadap perempuan?

Pada tahun 2017 lalu Komnas Perempuan meminta pengevaluasian gerbong KRL yang dikhususkan perempuan setelah beberapa kali terjadi kasus kekerasan perempuan terhadap perempuan, karena berebut tempat duduk.<sup>5</sup> Kekerasan sesama perempuan itu tak hanya terjadi, karena perebutan tempat duduk, tapi juga karena saling cibir dan pukul. Bahkan, menurut laporan *Tirto.id*, seorang penumpang perempuan mengumpati seorang perempuan hamil yang meminta kesediannya untuk memberikan tempat duduknya.<sup>6</sup>

Mengapa seorang perempuan bisa melakukan kekerasan terhadap sesama perempuan? Bukankah mereka berada dalam kelompok yang senasib-sepenanggungan dalam menghadapi patriarki dan pria?

Sesungguhnya identitas perempuan—dan juga pria—tak hanya dibentuk oleh gender, tapi juga oleh orientasi seksual, status sosial, kelas sosial, jabatan, agama, ras, etnisitas, usia, ideologi politik, atau nasionalisme. Masing-masing identitas ini menstrukturkan kekuasaan secara berbeda kepada para pemiliknya. Karena itu kekerasan struktural tak hanya terjadi, karena perbedaan kelas ekonomi dan gender, tapi juga karena perbedaan berbagai identitas sosial itu. Kekuasaan jabatan seorang wanita direktur tentu lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan gender seorang pria bagian kebersihan di sebuah perusahaan.

Pada tahun 1990an, Kelly D. Weisberg, seorang feminis yang ahli filsafat hukum, mengingatkan, bahwa menganggap semua perempuan punya pengalaman yang sama adalah sebuah kekeliruan esensialisme:

Essentialism constitutes the view that all women are alike, sharing a common “essence” or certain “essential” traits that differentiate them from men. Essentialism is characterized by central assumptions: first, the meaning of gender identity and the experience of sexism are similar for all women; and second, any differences between women are less significant than the traits women share in common.<sup>7</sup>

Jadi perhatian utama pemerintah dan para feminis Indonesia pada pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap bidang kehidupan tampaknya telah melupakan kenyataan, bahwa identitas pria dan perempuan tak hanya dibentuk oleh gender, tapi juga oleh orientasi seksual, status sosial, kelas sosial, jabatan, agama, ras, etnisitas, usia, ideologi politik, atau nasionalisme. Karena itu sangat mungkin seorang perempuan yang menganggap diri lebih berderajat (identitas status sosial atau kelas sosial) akan mengasari atau mengerasi sesama perempuan yang lebih rendah derajatnya. Hal ini

---

<sup>5</sup> “Komnas Perempuan: Gerbong Khusus Wanita Perlu Dievaluasi”, 18 Mei 2017, [www.detiknews.com;https://news.detik.com/berita/d-3504272/komnas-perempuan-gerbong-khusus-wanita-perlu-dievaluasi](http://www.detiknews.com;https://news.detik.com/berita/d-3504272/komnas-perempuan-gerbong-khusus-wanita-perlu-dievaluasi)

<sup>6</sup> “Dilema Gerbong Khusus Perempuan”, 18 Mei 2017, [www.tirto.id;https://tirto.id/dilema-gerbong-khusus-perempuan-coXw](http://www.tirto.id;https://tirto.id/dilema-gerbong-khusus-perempuan-coXw)

<sup>7</sup> D. Kelly Weisberg (ed.), 1993, *Feminist Legal Theory: Foundations*, Philadelphia, Temple University Press, hal. 335.

juga harus menjadi perhatian utama para feminis dan pemerintah saat menata ruang publik.